# BAB III

# OBJEK DAN METODE PENELITIAN

## 3.1 Objek Penelitian

### 3.1.1 Gambaran Umum Kerjasama Luar Negeri Indonesia – Inggris

#### 3.1.1.1 Sejarah Kerjasama Luar Negeri Indonesia – Inggris

Kedua negara tersebut memiliki sejarah kerjasama bilateral yang panjang. Kerjasama keduanya sudah dimulai sejak tahun 1949 dimana negara Inggris membuka kedutaan besar di Indonesia, dan Indonesia juga membuka kedutaan besar di negara Inggris tepatnya dikota London (http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_luar_negeri_Indonesia, Diunduh 29 Agustus 2013).

Setelah ketidakstabilan keamanan yang terjadi pada tahun 60'an, hubungan kerjasama Indonesia dan Inggris semakin meningkat. Karena pentingnya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, pemerintah Indonesia telah mempromosikan pengajaran pendidikan bahasa Inggris disekolah-sekolah lokal sejak tahun 1970.

Dimasa kini, Inggris menganggap Indonesia sebagai partner global yang penting yang akan membawa hubungan bilateral yang sama-sama saling menguntungkan. Kedua negara juga merupakan anggota dari organisasi G-20 yang bergerak dalam bidang ekonomi (https://www.gov.uk/government/world/indonesia.id, Diunduh 29 Agustus 2013).

Kondisi perekonomian negara-negara Eropa tak kunjung membaik sejak diterpa gelombang krisis ekonomi dunia 2008. Salah satu yang menjadi tantangan utama dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan diplomasi ekonomi di Inggris adalah keadaan ekonomi Inggris yang sedang terpengaruh oleh krisis ekonomi regional eropa yang diawali oleh Yunani dan kemudian Italia. Akibatnya pemerintah Inggris dibawah Perdana Menteri David Cameron melakukan pemotongan pengeluaran pemerintah secara besar-besaran dan tentu saja salah satu alokasi yang diprioritaskan untuk dikurangi adalah bantuan internasional. Artinya, menjajaki kerjasama dengan pihak non-pemerintah seperti perusahaan, asosiasi bisnis menjadi lebih penting lagi bagi agenda diplomasi Indonesia di Inggris. London sebagai salah satu pusat industri keuangan terkemuka di dunia tentu saja mencari alternatif penanaman modal baru setelah Eropa dilanda krisis peluang untuk menanamkan portfolio investasinya di negara berkembang yang tetap mengalami pertumbuhan ekonomi diantaranya negara-negara di kawasan Asia. Dengan demikian Indonesia diharapkan dapat bersaing dengan negara-negara berkembang yang sudah lebih dikenal seperti Cina dan India untuk mengundang investasi baik dalam bentuk portfolio (saham, obligasi, reksadana) maupun dalam bentuk penanaman modal langsung misalnya dalam bentuk pembangunan pabrik yang padat karya (Juwono, 2012).

Selain itu, bidang pendidikan dan kebudayaan juga banyak potensi yang bisa digali untuk kepentingan Indonesia di Inggris. Pada Simposium Asia Tenggara di *University of Oxford* tanggal 10 -11 Maret 2012 oleh *Project Southeast Asia* ternyata Indonesia tetap menjadi obyek penelitian yang menarik

dengan adanya 9 dari hasil penelitian terkait Indonesia serta 3 diantaranya dilakukan oleh mahasiswa doktoral asal Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia tersedianya berbagi macam skema beasiswa bagi mahasiswa Indonesia untuk melanjutan studi di luar luar negeri menjadi penting. Skema beasiswa baru dilluar dari yang disediakan oleh baik pemerintah Inggris (*chevening*) atau Indonesia (Dikti, Kementrian lainnya) diharapkan dapat disediakan oleh Perusahaan swasta atau yayasan pendidikan berbasis di Inggris atau Indonesia (Juwono, 2012).

Untuk bidang seni dan budaya, komunitas Indonesia serta warga Inggris yang mempunyai minat budaya Indonesia dapat pula diberdayakan. Sebagai contoh *School of Oriental & Africa Studies* (SOAS) di London sering mengadakan pagelaran kesenian, begitu juga adanya kelompok warga Inggris dan Indonesia yang tergabung dalam *Oxford Gamelan Society* yang bisa diajak kerjasama untuk bekerjasama oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di London sebagai perwujudan kontak langsung dengan warga Inggris untuk bersama-sama mempromosikan Indonesia (Juwono, 2012).

Hubungan kedua negara sudah berjalan dengan sangat baik dan telah berlangsung lama. Bahkan bisa dikatakan kontak formal pertama kedua negara tersebut dimulai pada 200 tahun yang lalu dimana warga Inggris Sir Tim Raffles datang dan diantaranya yang berinisiatif memulai proyek renovasi candi Borobudur. Akhirnya, sebagai diplomat karir dengan pengalaman yang panjang tentunya kita berharap agar Dubes Hamzah Thayeb dapat sukses menggali potensi-potensi kerjasama baru serta mendorong agenda ekonomi , politik,

keamanan, pendidikan serta kebudayaan Indonesia agar dapat berhasil di perjuangkan di Inggris (http://vishnujuwono.wordpress.com/tag/hubungan-bilateral/, Diunduh 29 Agustus 2013).

### 3.1.1.2 Bidang Kerjasama Luar Negeri Indonesia – Inggris

Inggris adalah negara yang penting bagi Indonesia, karena hubungan Indonesia dan Inggris sudah terjalin sejak 1949. Hubungan bilateral RI-Inggris dalam lima tahun terakhir berjalan dengan baik, semakin erat dan terus sejak tahun 2006. Kedua negara telah memiliki payung kerja sama di beberapa bidang seperti pertahanan, ekonomi kreatif, pendidikan, pertahanan, olahraga dan ESDM. Kerjasama tersebut semakin erat terlaksana semenjak ditanda tanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Indonesia dan Inggris pada bulan November 2012 di London (http://budpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2116, Diunduh 29 Agustus 2013) .

Ada enam bidang kerjasama yang telah disepakati yaitu: (1) Pertahanan, (2) Ekonomi Kreatif, (3) Pendidikan, (4) Olahraga, (5) Penanggulangan Bencana Alama, dan (6) Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM).

Pertama, kerja sama pada bidang pertahanan. Kerja sama bidang pertahanan berupa peningkatan kapasitas bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Pusat Studi Perdamaian dan Keamanan dalam bentuk peralatan audio visual untuk pelatihan bahasa, juga menyediakan kursus-kursus dan seminar bagi anggota pasukan perdamaian (Tempo, 2012). Bentuk kerja sama di bidang

pertahanan lainnya berupa kontrak penjualan alat-alat pertahanan kepada angkatan udara, angkatan darat, dan angkatan laut Indonesia.

Peralatan itu di antaranya peluru kendali starstreak, senapan sniper, kapal perang kecil multiguna (*Multi Roles Light Frigate* – MLRF), dan suku cadang untuk pesawat tempur Hawk 109/209 (Tempo, 2012). Kemenhan memiliki anggaran Rp 81 triliun yang diperuntukkan untuk belanja alutsista. Untuk rencana pembelian alutsista dari Inggris tidak terlalu besar (Republika, 2013).

Kedua, pada bidang ekonomi kreatif. *Memorandum of Understanding between the government of Indonesia and the government of United Kingdom on the cooperation of creative industries* (1-11-1012) yang melingkupi bidang: Musik, Film, Fashion, Arsitektur, Seni dan kerajinan, Desain, Animasi, Games, Digital development, dan Kuliner (budpar.go.id, 2013).

Ketiga, pada bidang pendidikan. Mengembangkan studi mengenai Indonesia di universitas-universitas di Inggris, seperti di Exeter, SOAS, dan Oxford (Tempo, 2012). Selain itu, ada beasiswa studi di Inggris untuk 150 mahasiswa Indonesia per tahun yang melengkapi beasiswa DIKTI (Tempo, 2012).

Keempat, pada bidang penelitian dan penanggulangan bencana alam. Peningkatkan kerjasama dalam bidang penelitian dan pengembangan, investasi, dan produksi. Dalam pertemuan itu juga dicapai kesepakatan untuk mengembangkan gas alam cair di Indonesia dengan nilai proyek mencapai 7,5 miliar *poundsterling* (Faqih Wardhana, Sindonews: 2012). Kerjasama di bidang penanggulangan bencana alam antar kedua negara. Terkait dengan kerjasama pertahanan, diharapkan kemampuan di bidang pertahanan dapat digunakan untuk

tujuan-tujuan non-militer, seperti penanggulangan bencana alam (suaramerdeka.com, 2013).

Kelima, kerja sama pada bidang olahraga. Garuda Indonesia & Liverpool FC Experience (sportdetik.com, 2013). Pada September 2012 lalu Garuda Indonesia dan Liverpool FC telah resmi menandatangani perjanian kerjasama partnership yang berlaku selama tiga musim kompetisi (2012-2015). Dari kerjasama itu, Garuda Indonesia akan menjadi *"Global Official Airline Partner"* bagi Liverpool FC.

Keenam, pada bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kesepakatan kerja sama dalam bidang *Energy Modeling*, *Carbon Capture and Storage Project (CCS)*, dan laboratorium energi masa depan. Dalam pertemuan itu juga dibahas konsep *Joint of Arrangement (JoA) on Energy* antara Indonesia dan Inggris. Kunjungan Menteri ESDM Jero Wacik juga bertujuan meyakinkan Inggris agar berinvestasi 12 miliar dollar AS dalam pembangunan Kilang Train-3 Lapangan Tangguh dan *Premier Oil* yang akan berinvestasi 700 juta dollar AS di Indonesia (esdm.go.id, 2012).

Pada kesimpulannya, kedua negara baik Inggris maupun Indonesia saling mendapatkan keuntungan dari kerja sama yang mereka jalin sejak tahun 2006 lalu. Inggris mendapatkan keuntungan dari pembelanjaan Alutsista dari bidang pertahanan, sedangkan Indonesia juga mendapatkan keuntungan dari bidang pendidikan dan ekonomi kreatif termasuk juga dari bidang pertahanan berupa peningkatan kapasitas bahasa bagi Pasukan Perdamaian Indonesia untuk PBB.

### 3.1.2 Gambaran Umum Pasukan Perdamaian PBB dan Pasukan Perdamaian Indonesia Untuk PBB

#### 3.1.2.1 Sejarah Pasukan Pedamaian PBB

Dengan berkembangnya ilmu hubungan internasional pasca Perang Dunia II, ditambah dengan banyaknya tindakan dekolonisasi dan negara-negara yang memerdekakan diri, semakin terlihat jelas bahwa konflik internasional tidak semuanya dapat diselesaikan dengan cara-cara damai. Beberapa situasi konflik internasional akan memaksa negara lain untuk menggunakan kekuatan militernya, kondisi seperti ini yang mendorong terciptanya *peacekeeping operation* di PBB.

Fauzi (2012: 1-3) mendefinisikan peacekeeper atau peacekeeping ialah pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas untuk menolong Negara yang berkecamuk oleh konflik dengan cara memantau dan mengawasi proses perdamaian di daerah pasca-konflik dengan menolong para bekas tentara yang terlibat dalam memberlakukan perjanjian perdamaian yang mungkin telah meraka tandatangani serta membantu warga daerah tersebut. Pasukan Perdamaian dikirim oleh negara yang terdaftar sebagai anggota PBB dan ingin berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dunia serta dengan tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai negara tersebut.

Pasukan perdamaian adalah penempatan netral dan ringan angkatan bersenjata dalam usaha penghentian permusuhan bersenjata, dan dengan izin dari negara di wilayah mana kekuatan-kekuatan tersebut berkonflik, untuk mencegah meningkatnya konflik militer dan mempromosikan penyelesaian di mana sengketa berada (Diehl 1994: 13).

Dalam bertugas sebagai penjaga perdamaian dunia, *peacekeeper* harus memperhatikan beberapa hal untuk meningkatkan profesionalisme mereka. Hal tersebut dilakukan karena adanya perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing pasukan dari berbagai negara, sehingga diperlukan sebuah regulasi yang bersifat global untuk menyamakannya. Menurut Faqih (2003) hal-hal yang perlu diperhatikan itu adalah sebagai berikut:

1. Merubah Pola Pikir (*Mindset*)

   Prajurit yang terjun dalam medan tempur dilatih untuk memiliki motto *"kill or to be killed"* (membunuh atau dibunuh). Hal itu menunjukkan bahwa para prajurit diajarkan untuk menjadi prajurit tempur. Ketika bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian dunia, pola pikir tersebut harus dirubah menjadi prajurit pemelihara perdamaian. *Pecekeeper* harus berperan sebagai pihak tanpa impartialitas (tidak berpihak). Prajurit *peacekeeper* juga harus berada di tengah-tengah kedua belah pihak yang bertikai, tanpa harus berpihak pada salah satu pihak. Berkomunikasi dengan tujuan menyampuri urusan pihak-pihak yang bertikai juga menjadi larangan bagi *peacekeeper*. Oleh karena itu, *peacekeeper*sebagai prajurit penjaga perdamaian dunia harus mampu mencegah munculnya pertikaian yang ditimbulkan oleh pihak-pihak bersenjata maupun provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Melaksanakan Aturan Pertempuran (RoE) dan Protap (SOP)

   Di lingkungan penugasan PBB, *peacekeeper* harus mematuhi segala aturan yang berlaku. *Peacekeeper* sebagai prajurit professional memiliki kelebihan untuk melaksanakan segala aturan tersebut dengan mudah. Namun di sisi lain, masih ada beberapa prajurit *peacekeeper* yang melanggar aturan yang sebenarnya bisa dihindari. Pelanggaran tersebut misalnya berkendara tanpa menggunakan sabuk pengaman, berkendara melebihi batas kecepatan, merokok di tempat tugas yang ber-AC, dan lain-lain. *Peacekeeper* juga harus menggunakan RoE (aturan pertempuran) dan SOP (prosedur tetap/protap) untuk diimplementasikan di lingkungan penugasan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin dialami oleh prajurit *peacekeeper*. Apabila kecelakaan disebabkan oleh *human error* maka PBB tidak akan memberikan kompensasi.

3. Kemampuan Bahasa Inggris

   Prajurit yang tergabung dalam *peacekeeper* beranggotakan prajurit-prajurit yang berasal dari berbagai negara di dunia. Untuk memudahkan komunikasi, diperlukan kemampuan bahasa yang bersifat universal. Bahasa tersebut adalah bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Dengan menguasai bahasa Inggris, kemudahan dalam berkomunikasi di lapangan maupun di pangkalan akan diperoleh.

4. Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan IT

   Penguasaan alat-alat elektronik seperti komputer menjadi hal mutlak yang harus dikuasai oleh prajurit *peacekeeper*. Hal ini dikarenakan seluruh kegiatan administrasi dan penyampaian informasi yang menyangkut hal pelaporan, pengajuan bekal, penerimaan perintah operasi dilakukan melalui lotus note (sejenis e-mail), demikian halnya dalam hal penyampaian berita yang keseluruhannya menggunakan komputer dalam penyampaian. Oleh karena itu, selain kemampuan berbahasa inggris, penguasaan komputer dan IT juga harus dikuasai untuk memudahkan pola berkomunikasi.

5. *How to Win the Heart and Mind of the People*

   Selain kemampuan alutsista, prajurit TNI yang bergabung dalam pasukan *peacekeeper* juga diharapkan mampu memenangkan hati dan pikiran rakyat. Profesionalisme TNI dalam *peacekepeer* tidak akan sempurna dan bermanfaat apabila dalam penugasan tidak dapat memenangkan hati dan pikiran rakyat setempat. Hal itu dikarenakan tanpa dukungan rakyat *peacekeeper* akan kesulitan untuk menegakkan perdamaian.

Operasi perdamaian PBB perdamaian melibatkan penggunaan expedisi yang terdiri dari personil berseragam (polisi dan / atau militer) dengan atau tanpa otorisasi PBB, dengan mandat atau program untuk:

(1) membantu dalam pencegahan bersenjata konflik dengan mendukung proses perdamaian;

(2) berfungsi sebagai alat untuk melihat atau membantu dalam pelaksanaan gencatan senjata atauperjanjian perdamaian; atau

(3) menegakkan genjatan senjata, perjanjian damai atau kehendak Dewan Keamanan PBB dalam rangka untuk membangun perdamaian yang stabil (Williams 2010).

Buku Pegangan Operasi Perdamaian PBB (2003: 1) menjelaskan bahwa:

> "Penjaga perdamaian PBB didasarkan pada prinsip bahwa kehadiran berimbang di tempat konflik dapat meredakan ketegangan antara pihak-pihak yang bermusuhan dan menciptakan ruang untuk negosiasi politik. Pasukan Perdamaian Perdamaian dapat membantu menjembatani kesenjangan dan penghentian permusuhan dan menciptakan perdamaian abadi, tapi hanya jika pihak yang terlibat konflik memiliki kemauan politik yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Awalnya dikembangkan sebagai sarana menangani konflik antar-negara, perdamaian telah semakin telah digunakan dalam konflik intra-negara dan perang sipil, yang sering ditandai dengan beberapa faksi bersenjata dengan berbeda tujuan politik dibawah garis retak komando. "

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa operasi perdamaian PBB dibentuk berdasarkan prinsip bahwa kehadiran pasukan ini dapat mengurangi ketegangan antara pihak-pihak yang sedang bermusuhan dan menciptakan ruang untuk kedua negara yang bertikai untuk membuka dialog damai dalam bentuk negosiasi politik.

Perdamaian dapat membantu menjembatani kesenjangan antara penghentian permusuhan dan menciptakan perdamaian abadi, tapi hanya jika pihak yang terlibat konflik memiliki kemauan politik yang serupa.

Menurut buku *The Blue Helmets*: *Review of UN Peacekeeping*, definisi dari peacekeeping itu sendiri adalah:

> "... Sebuah operasi yang melibatkan personil militer tetapi tanpa kekuatan penegakan hukum, yang dilakukan oleh PBB untuk membantu mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional di wilayah konflik. Operasi ini bersifat sukarela dan didasarkan pada persetujuan dan kerjasama. Sementara mereka melibatkan penggunaan personil militer, mereka mencapai tujuan mereka bukan dengan kekuatan senjata, sehingga kontras dengan 'tindakan penegakan' Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Pasal 42. "

Berdasarkan pemahaman tersebut, *peacekeeping operation* adalah suatu operasi yang melibatkan personel militer tetapi tanpa kekuatan daya serang, yang dibawahi oleh PBB untuk membantu menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional di wilayah-wilayah berkonflik. Operasi ini bersifat sukarela dan didasarkan atas kesediaan dan kerjasama. Didalam pelaksanaannya, operasi perdamaian memang melibatkan penggunaan dari personel militer, tetapi mereka mencapai tujuan-tujuan mereka tanpa penggunaan kekuataan senjata yang berbeda dari pengertian *enforcement* PBB yang terdapat di Artikel 42.

Buku pegangan operasi perdamaian PBB (2003: 1-2) kemudian menjelaskan bahwa sesuai mandatnya, operasi perdamaian antar bangsa memiliki beberapa tugas, diantaranya:

1. Membantu dalam pelaksanaan perjanjian damai yang komprehensif;
2. Memantau gencatan senjata atau penghentian permusuhan untuk memungkinkan ruang untuk negosiasi politik dan penyelesaian damai sengketa;

3. Menyediakan lingkungan yang aman mendorong kembali ke kehidupan sipil yang normal;
4. Mencegah pecahnya konflik lintas batas;
5. Memimpin negara atau wilayah melalui transisi ke pemerintahan yang stabil berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, good governance dan pembangunan ekonomi, dan
6. Mengelola sebuah wilayah untuk masa transisi, sehingga melaksanakan semua fungsi yang biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Buku pegangan operasi perdamaian PBB (2003: 1) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya para pasukan penjaga perdamaian tidak dapat mencapai perdamaian yang abadi. Mandat dari pasukan penjaga perdamaian melingkupi berbagai tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan dalam bentuk konflik, namun mandat tersebut tidak selalu berada dalam kendali misi saja tapi dari pihak lain.

Beberapa partner yang tergabung untuk menjalankan mandat ini adalah negara yang bermusuhan, pemerintah tuan rumah yang bersangkutan, grup oposisi, pasukan tidak teratur serta badan administrasi dan pihak lain seperti negara-negara tetangga dan masyarakat, masyarakat sipil dan penduduk lokal dan media. Partner kunci lain yang terlibat seperti:

1. Negara kontribusi personel;
2. Negara-negara Anggota lainnya;
3. Badan-badan PBB, dana dan program;

4. Donor;
5. Militer Daerah atau polisi;
6. Organisasi regional dan sub-regional;
7. Lembaga-lembaga Bretton Woods;
8. Organisasi antar-pemerintah;
9. Organisasi-organisasi non-pemerintah (LSM), dan
10. Media internasional

(Buku pegangan operasi perdamaian PBB, 2003: 11).

Biasanya *Peacekeeping Operation* dilakukan hanya setelah konflik pecah. Piagam PBB mengarah kepada sistem hubungan internasional dimana penggunaan kekuatan sebagai sarana dari kebijakan luar negeri tidak berlaku lagi. Hal ini berarti bahwa PBB bergantung pada waktu yang dibutuhkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu permasalahan konflik. Adapun metode - metode yang digunakan PBB didalam *Peacekeeping Operation*-nya antara lain melalui usaha-usaha menjalin hubungan diplomatik multilateral yang dilakukan berdasarkan kerangka kerja dari Dewan Keamanan, hubungan bilateral yang dilakukan oleh negara-negara anggota PBB, atau melalui badan-badan PBB lainnya oleh Sekretaris-Jendral PBB. Metode-metode disebut diatas juga dapat menjadi metode *Peacemaking* PBB dan kesemuanya itu baru akan menjadi efektif untuk PBB jika dilakukan di setiap level dari suatu konflik yang terjadi (Buku pegangan operasi perdamaian PBB, 2003: 1).

*Peacekeeping Operation* dimaksudkan berjalan dalam jangka waktu pendek dan karena itu *Peacekeeping Operation* bersifat sementara. Dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan yang disebutkan didalam mandat, suatu *Peacekeeping Operation* tidak pernah mampu dalam meredam dan mengakhiri suatu konflik secara independen. Tugas utama dari suatu *Peacekeeping Operation* ada dua, yaitu; 1) untuk menghentikan atau membendung konflik dan membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi usaha-usaha *Peacemaking* dapat berjalan, 2) mengawasi jalannya proses implementasi dari suatu kesepakatan yang telah melewati proses negosiasi oleh para *Peacemakers* (Rahmawati, 2010: 71-72).

Suatu *Peacekeeping Operation* akan sulit untuk dianggap berhasil atau tidak dalam menjalankan mandat yang dijalankannya. Seperti yang terlihat pada kasus *Peacekeeping Operation* di Cyprus. Pada Desember 1963 pecah perang sipil di Republik Cyprus yang baru saja terbentuk. Dan pada tahun 1964 PBB memutuskan untuk menurunkan pasukan perdamaian ke dalam suatu *Peacekeeping Operation* yang dikenal dengan nama *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus* (UNFICYP). *Peacekeeping Operation* tersebut langsung aktif berjalan dan secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil dalam menjaga perdamaian, namun sekaligus gagal dalam mendamaikan pasukan-pasukan yang terlibat di dalam perang sipil tersebut (Rahmawati, 2010: 71-72).

Pasukan *Peacekeeper* dikirim oleh negara yang terdaftar sebagai anggota PBB dan ingin berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dunia serta dengan tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai negara tersebut. Anggota misi

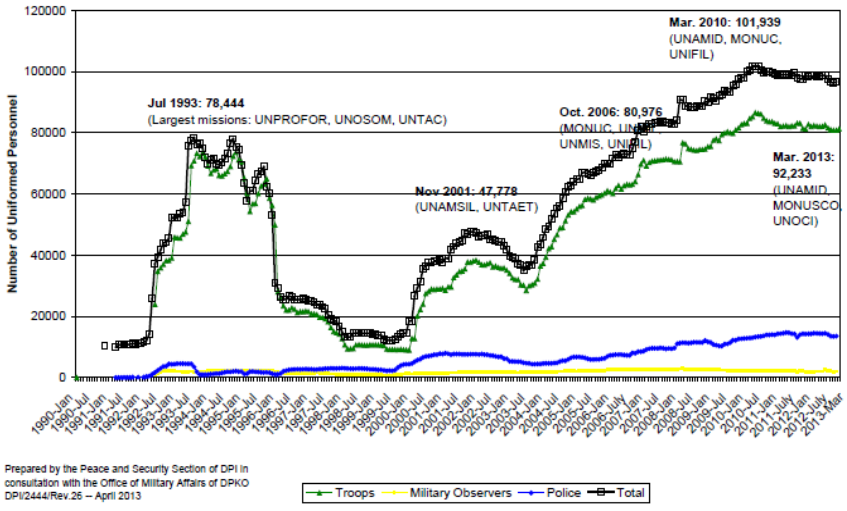
perdamaian PBB yang bertugas di suatu daerah operasi, mempunyai tugas dan tanggung jawab moral terhadap keberhasilan misi penugasan tersebut.

Dalam menjalankan misi tersebut mereka tidak hanya mewakili negara atau organisasi pengirimnya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa mereka mewakili PBB selaku badan international yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan misi tersebut. Sehingga apapun tingkah lakunya baik yang bersifat positif maupun negatif akan berdampak terhadap lembaga PBB.

Pasukan Penjaga Perdamaian PBB terdiri dari tiga element utama yaitu tentara perdamaian, pengawas militer, dan polisi. Secara keseluruhan terdapat 116 negara kontributor bagi pasukan ini dimana Indonesia menempati ranking 16 tertinggi dengan jumlah pasukan sebesar 1.730 personel.

Berikut daftar kontribusi pasukan perdamaian PBB per 31 Maret 2013 (14 Misi yang masih berjalan).

Grafik 3.1. Kontribusi pasukan perdamaian PBB per 31 Maret 2013




(http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/chart.pdf, Diunduh 6 Mei 2013).

### 3.1.2.2 Sejarah Indonesia Sebagai Anggota Pasukan Penjaga Pedamaian PBB

Keikutsertaan Indonesia dalam misi operasi perdamaian PBB merupakan kontribusi nyata pemerintah Indonesia dalam ikut menciptakan perdamaian dunia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD RI. Keikutsertaan ini sudah dimulai sejak tahun 1957, dengan pengiriman satu batalyon infanteri untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah antara Israel dan Mesir, yang dikenal dengan nama Kontingen Garuda I / *United Nation Emergency Force* (KONGA-1/UNEF). Sejak saat itu, kontingen Indonesia yang dikirim dalam misi perdamaian PBB dinamakan Kontingen Garuda / KONGA.

Bagi bangsa Indonesia sendiri, pengiriman tentara (pasukan *peacekeeper*) ke daerah-daerah konflik tidak hanya bertujuan untuk ikut aktif dalam menjaga perdamaian dunia, tetapi memiliki tujuan lain yang ingin dicapai, diantaranya sebagai berikut :

1. Pengiriman pasukan *peacekeeper* diharapkan nantinya dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia dimata dunia.
2. Memudahkan bangsa Indonesia untuk melakukan kerjasama dalam hubungan internasional.
3. Sebagai bentuk penampakan kekuatan militer bangsa Indonesia sehingga dunia mengakuinya (berpengaruh terhadap pertahanan bangsa) (http://www.pkc-indonesia.com/index.php/component/content/article/37-dokumen/113-penjaga-perdamaian-asal-indonesia?format=pdf, Diunduh 17 April, 2013).

Peran aktif Indonesia di dunia Internasional dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan politik, bantuan kemanusiaan maupun peranannya baik dalam bentuk sebagai pengamat militer, staf militer atau Kontingen Satgas operasi pemeliharaan perdamaian sebagai duta bangsa di bawah bendera PBB. Keikutsertaan Indonesia dalam upaya perdamaian dunia adalah dengan menjadi anggota pasukan perdamaian. Keikutsertaan Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian sudah dimulai sejak tahun 1957.

Pasukan perdamaian dari Indonesia dikenal dengan nama Kontigen Garuda atau Konga. Sejak tahun 1967 sampai saat ini Garuda Indonesia telah diterjunkan keberbagai kawasan konflik bergabung dengan pasukan perdamaian PBB (http://irmayunittaa.blogspot.com/2013/01/makalah-indonesia-dan-perdamaian-dunia.html diunduh 17 April, 2013).

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan terletak di Asia, keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian PBB sangat diharapkan, karena dapat dipandang sebagai penyeimbang di dalam komposisi misi perdamaian PBB. Hal ini ditambah dengan kenyataan, bahwa konflik yang terjadi saat ini, sering melibatkan negara muslim atau negara berpenduduk muslim, seperti yang terjadi di Bosnia, Libanon, Irak bahkan Darfur di Afrika. Kehadiran negara berpenduduk muslim seperti Indonesia di negara-negara yang tengah menghadapi konflik tersebut tentu dapat menjadi penyeimbang yang penting dan representatif.

Keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian PBB sampai saat ini berlangsung sukses dan sangat dihargai oleh PBB maupun Negara-negara lain. Beberapa penugasan ke luar negeri yang pernah dilaksanakan oleh TNI diantaranya ke negara–negara seperti:

Tabel 3.1. Pengiriman Pasukan Perdamaian Asal Indonesia Dalam Misi Perdamaian PBB

| No. | Nama Misi/Nama Pasukan | Tahun | Tempat Konflik |
|---|---|---|---|
| 1 | ONUC | 1961, 1963 | Kongo |
| 2 | UNEF | 1973 - 1975 | Vietnam |
| 3 | UNIIMOG | 1989 | Irak |
| 4 | UNTAG | 1989 | Namibia |
| 5 | UNIKOM | 1992 | Kuwait |
| 6 | UNTAC | 1993 | Kamboja |
| 7 | UNOSOM II | 1993 | Somalia |
| 8 | UNPROFOR | 1993, 1996 | Bosnia |
| 9 | UNIMOG | 1997 | Macedonia |
| 10 | UNTAES | 1997 | Slovania |
| 11 | UNCRO | 1995 | Kroasia |
| 12 | UNIFIL | 1997 | Reblaka |
| 13 | ONUMOZ | 1994 | Mozambik |
| 14 | Pasukan KONGA XVII *(Observer Mission)* | 1999 | Filiphina |
| 15 | Pasukan KONGA XVIII *(Observer Mission)* | 1998 | Tajikistan |
| 16 | Pasukan KONGA XIX/1 *(Observer Mission)* | 1999 | Sierra Leon |
| 17 | MONUC | 2002 – Sekarang | Kongo |
| 18 | UNMIL | 2004 – Sekarang | Liberia |
| 19 | UNMIS | 2006 – Sekarang | Sudan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20 | UNIFIL | 2006 – Sekarang | Lebanon |
| 21 | UNMIN | 2007 – Sekarang | Nepal |
| 22 | UNAMID | 2008 | Darfur |

**(**http://www.tni.mil.id/news.php?q=opn&cid=INT&id=113012006122425 Diunduh 9 Mei, 2013).

Kontribusi Indonesia dalam misi pemelihara perdamaian Indonesia secara signifikan meningkat dalam 10 tahun terakhir, hal ini terlihat dalam perubahan peringkat Indonesia dari peringkat 55 dengan kontribusi sejumlah 34 personil pada tahun 2002 menjadi peringkat 16 dengan kontribusi sejumlah 1.795 personil pada Bulan Desember 2010. Perubahan tersebut dapat dilihat di tabel dibawah ini;

Tabel 3.2. Kontribusi Pasukan Dalam Misi Perdamaian PBB (10 Tahun Terakhir)

| **No.** | **Tahun** | **Kekuatan Personil** | | | **Peringkat** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Indonesia** | **Total Pasukan** | **Persentase** | |
| 1 | 2001 | 59 | 47108 | 0.125 % | 54 |
| 2 | 2002 | 34 | 39652 | 0.086 % | 55 |
| 3 | 2003 | 205 | 39329 | 0.52 % | 42 |
| 4 | 2004 | 201 | 64720 | 0.31 % | 42 |
| 5 | 2005 | 199 | 69838 | 0.29% | 47 |
| 6 | 2006 | 1058 | 80368 | 1.32 % | 21 |
| 7 | 2007 | 1075 | 84309 | 1.28% | 21 |
| 8 | 2008 | 1530 | 91712 | 1.67 % | 18 |
| 9 | 2009 | 1657 | 98197 | 1.69 % | 16 |
| 10 | 2010 | 1795 | 98638 | 1.82 % | 16 |

(Sumber: UNDPKO, 2001-2010).

Tabel 3.3. Kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian per 31 Maret 2013

| **Negara** | **Misi PBB** | **Deskripsi** | **Jenis Kelamin** | | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Laki-Laki** | **Perempuan** | |
| Indonesia | MINUSTAH | 1. Polisi Individual | 7 | 1 | 8 |
| | | 2. Kontingen Tentara | 169 | 0 | 169 |
| | | | 176 | 1 | 177 |
| | MONUSCO | 1. Ahli Misi | 12 | 0 | 12 |
| | | 2. Kontingen | 177 | 0 | 177 |
| | | Tentara | 189 | 0 | 189 |
| | UNAMID | 1. Polisi Individual | 14 | 5 | 19 |
| | | 2. Unit Polisi Berformasi | 140 | 0 | 140 |
| | | 3. Ahli Misi | 5 | 0 | 5 |
| | | 4. Kontingen | 1 | 0 | 1 |
| | | Tentara | 160 | 5 | 165 |
| | UNIFIL | Kontingen Tentara | 1.175 | 12 | 1187 |
| | UNISFA | 1. Ahli Misi | 1 | 0 | 1 |
| | | 2. Kontingen | 1 | 0 | 1 |
| | | Tentara | 2 | 0 | 2 |
| | UNMIL | Ahli Misi | 1 | 0 | 1 |
| | UNMISS | 1. Ahli Misi | 3 | 3 | 6 |
| | | 2. Kontingen | 3 | 0 | 3 |
| | | Tentara | 6 | 3 | 9 |

(http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2013/mar13_3.pdf, Diunduh 9 Mei, 2013).

Kesimpulan dari pemaparan data-data diatas adalah jelas bahwa Indonesia berperan aktif dalam usaha menjaga perdamaian dunia dan sudah dilakukan selama puluhan tahun. Indonesia sendiri menganut politik luar negri bebas aktif yang bermakna sebagai usaha untuk mengabdikan negara kepada kepentingan nasional dan internasional. Dengan demikian, kebijakan politik luar negri Indonesia bersifat fleksibel. Artinya, tidak kaku dalam menjalin hubungan dengan negara lain, dan memiliki prinsip yaitu: memelihara, memperjuangkan, dan mempertahankan kemerdekaan, perdamaian, serta keadilan sosial di antara bangsa-bangsa di dunia. Prinsip-prinsip tersebut harus dipegang teguh dalam menjalankan hubungan atau kerja sama antara bangsa di dunia.

**3.1.2.2.1 Dasar Hukum Negara Indonesia Dalam Menjaga Perdamaian Dunia**

Dalam Surat Keputuan Panglima TNI Nomor Skep/25/IX/2005, 27 September 2005, dinyatakan bahwa ada beberapa prinsip yang menjadi landasan tentang partisipasi kontingen Indonesia untuk ikut serta dalam pelaksanaan misi perdamaian PBB, yaitu:

1. Partisipasi dalam tugas operasi perdamaian PBB 1. didasarkan pada Undang-undang dan kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu: alinea keempat Pembukaan UUD 1945, kebijakan politik bebas aktif, UU RI no 37/1999 ayat 10 tentang pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB ditetapkan oleh Presiden melalui konsultasi dengan DPR, serta TAP MPR RI No VII/2000 tentang peran TNI dan POLRI ayat 8.

2. Mandat yang sah, jelas, handal dan terukur dari Resolusi Dewan Keamanan PBB.
3. Adanya *Rule of Engagement* (RoE) yang jelas.
4. Keikutsertaan dalam mekanisme penentuan mandate.
5. Penghindaran campur tangan dan kepercayaan serta keyakinan dari pihak-pihak yang bertikai.
6. Keputusan politik pemerintah Indonesia dan dukungan rakyat Indonesia serta sebagai implementasi dari Piagam PBB.

Selanjutnya, dalam perkembangannya setelah diterbitkannya beberapa peraturan dan perundangan yang berlaku untuk TNI, maka pengiriman pasukan TNI untuk misi perdamaian PBB didasarkan pada:

1. Undang-Undang RI Nomor 3/2002 tentang 1. Pertahanan Negara Ayat 10, tentang partisipasi aktif TNI untuk ikut menciptakan keamanan dan perdamaian di kawasan regional maupun internasional.
2. Undang-Undang TNI Nomor 34/2004 Ayat 2. 7, tentang salah satu tugas TNI untuk ikut berpartisipasi dalam misi perdamaian PBB yang berdasarkan pada politik luar negeri Indonesia.
3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/2/I/2007, 3. 12 Januari 2007 tentang Doktrin TNI "Tri Dharma Eka Karya", yang dijadikan sebagai landasan dan panduan untuk tugas-tugas TNI diantaranya tugas misi perdamaian PBB sebagai bagian tugas TNI di bidang Operasi Militer Selain Perang.

#### 3.1.2.2.2 Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Indonesia (PMPP)

*Indonesian National Defense Force Peacekeeping Center* (INDF-PKC) atau dikenal sebagai Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) pada tahun 2011 yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bukit Setntul, Bogor - Jawa Barat. Diharapkan keberadaan INDF-PKC dapat menciptakan menciptakan sebuah sarana yang mengumpulkan keahlian perdamaian dan menyebarluaskan pengetahuan kepada praktisi baik dalam kawasan regional maupun internasional.

Visi PMPP TNI adalah menyiapkan personel TNI yang profesional dalam mengemban tugas-tugas misi pemeliharaan perdamaian.

Misi PMPP TNI adalah berperan aktif dalam mendukung misi pemeliharaan perdamaian dunia melalui penyelenggaraan kegiatan pembekalan, pelatihan dan pendidikan serta pertukaran informasi dalam rangka meningkatkan SDM personel TNI.

Tugas pokok PMPP TNI adalah merencanakan dan menyiapkan personel TNI dalam penugasan, pelatihan dan pendidikan di dalam dan di luar negeri dalam ruang lingkup operasi pemeliharaan perdamaian.

Fungsi PMPP TNI adalah :

1. Merumuskan, merencanakan, menyiapkan, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengiriman dan penerimaan misi pemeliharaan perdamaian.

2. Menyelenggarakan kegiatan latihan serta memelihara kemampuan personel maupun satuan TNI yang dipersiapkan untuk operasi pemeliharaan perdamaian.
3. Merencanakan kebutuhan operasi, administrasi, dan logistik dalam rangka pelaksanaan latihan bagi personel dan satuan TNI yang disiapkan untuk melaksanakan operasi pemeliharaan perdamaian.

Dengan dibangunnya Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) ini, Indonesia menunjukkan niat dan tekad yang kuat untuk semakin meningkatkan kontribusi untuk PBB dalam usahanya menjaga perdamaian dunia.

### 3.1.3 *Peacekeeping English Project*

Selama lebih dari satu dekade pengajaran bahasa Inggris untuk kalangan personil militer untuk membantu mereka dalam usaha mejaga perdamaian antar bangsa dan operasi kemanusiaan, peran mendatang dari program yang didanai oleh pemerintah negara Inggris telah menjadi program yang telah dijalankan secara menyeluruh oleh sebagian negara didunia.

Lotbinjere (2009) editor dari *majalah Learning English* menjelaskan bahwa *The Peacekeeping English Project* (PEP), didirikan oleh *British Council*, sebuah organisasi budaya dan kependidikan pemerintah negara Inggris pada tahun 1996 sebagai usaha dalam menyatukan mantan tentara kemiliteran Uni Soviet di PBB dan program perdamaian NATO yang telah berjalan, dan untuk memecah kecurigaan pada era perang dingin dalam bentuk operasi bersama.

Dengan sejarah panjang dalam menyiapkan program pengajaran bagi kalangan militer, polisi, dan penjaga perbatasan di lebih dari 30 negara diseluruh negara, para staff dari *The Peacekeeping English Project* (PEP) telah berpengalaman dalam pengajaran terutama dalam bidang komunikasi. Keahlian komunikasi ini diperlukan para personil yang memiliki bahasa asli dimana mereka ditugaskan dalam misi yang kompleks dan sewaktu-waktu berbahaya yang menggunakan bahasa Inggris sebaga bahasa manual mereka.

Cooper (2005) penulis dari "*peacekeeping english"* kemudian menerangkan bahwa *Peacekeeping English Project* (PEP) adalah proyek yang berfungsi untuk mengurangi, menyelesaikan, dan mencegah konflik global dengan meningkatkan kemampuan komunikasi berbahasa Inggris. Proyek ini dibawahi langsung oleh *British Council* dengan pengawasan dari *Ministry Of Defence* (MOD), *The Foreign and Commonwealth Office* (FCO), dan *Justice and Home Affairs* (JHA) memberikan kemudahan bagi para tentara multinasional mengambil bagian dalam operasi NATO, EU, dan PBB untuk berkomunikasi secara efektif satu sama lain dengan menggunakan bahasa Inggris. Situs *Peacekeeping English Project* PEP pada *British Council* (Cooper, 2005) menyatakan bahwa bahasa Inggris sangat diperlukan bagi:

1. Untuk *"interoperability"* yaitu memudahkan para tentara multinasional mengambil bagian dalam operasi NATO, EU, dan PBB untuk berkomunikasi secara efektif satu sama lain dengan menggunakan bahasa Inggris.

2. Untuk misi kemanusiaan yaitu memudahkan militer dan kekuatan keamanan lain dalam berinteraksi dengan kalangan non-pemerintah dalam konflik dan keadaan sesudah konflik berlangsung.
3. Untuk tentara dan polisi penjaga perbatasan, dan usaha mengurangi penyelundupan obat-obatan terlarang dan *human trafficking*.

   Sebagai alat untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan bagi Hak Asasi Manusia (HAM) (http://www.britishcouncil.org/learning-elt-pep-projects.htm, Diunduh 29 Agustus 2013).

Pada tahun 1996, para negara Baltic mengawali program pengajaran bahasa Inggris bagi Baltic battalion yang merupakan cikal bakal dari PEP, program tersebut kemudian diketuai oleh Sheilagh Neilson, Proyek Manager dan Koordinator dari *Peacekeeping English Project* PEP Bulgaria (http://www.britishcouncil.org/learning-elt-pep-projects-worldwide.htm, Diunduh 29 Agustus 2013).

Para instruktur *Peacekeeping English Project* PEP di Bulgaria kebanyakan dari latar belakang philologi bahasa Inggris untuk mengajar para tentara, polisi dan penjaga perbatasan.

Hal ini bermaksud bahwa ketika mereka memiliki kemampuan bahasa Inggris yang tinggi, para guru ini mungkin tidak memiliki jam mengajar yang tinggi, jadi bagian dari *Peacekeeping English Project* PEP adalah sebagai latihan teknik mengajar mereka. Proyek ini sekarang berpusat di Eropa Tengah dan Timur serta Asia Tengah. Tiga puluh lima proyek *Peacekeeping English Project*

PEP telah dirancang dan disiapkan sejak pembangunan PEP yang pertama kali tahun 1996.

Colonel Sheeley (2005) sebagai *first resident UK Defence Attaché to Central Asia* memaparkan bahwa kemampuan berkomunikasi sangatlah penting dalam kerjasama multinasional. Pelatihan bahasa Inggris adalah langkah utama untuk mencapai tujuan kerjasama tentara perdamaian dan memfasilitasi pertukaran ide maupun pendapat serta saran dari isu-isu pertahanan.

Hal serupa dikemukakan juga oleh Paul Woods (2005) mantan Director dari *Peacekeeping English Project*, bahwa dengan perencaan dan manajemen yang matang yang disesuaikan dengan konteks negara yang bersangkutan. Program ini mencakup berbagai aktivitas yang tercantum dalam kurikulum dan pengembangan materi, bentuk test dan pelatihan yang terkoordinasi dan *Peacekeeping English Project* dipandang sebagai bagian kesatuan dari strategi *British Council* di tahun 2010.

Dalam prakteknya, program *Peacekeeping English Project* tidak lepas dari kritikan para akademisi terutama ketika menjalankan *Peacekeeping English Project* di Republik Demokrasi Kongo (RDK), sebuah negara yang masih belum stabil dari pengaruh-pengaruh negara luar. Republik Demokrasi Kongo (RDK) ini memiliki bahasa resmi bahasa Perancis karena melihat dari sejarah kolonial Kongo, yang memiliki pengaruh hegemonik sendiri pada pemikiran dan perubahan perilaku dalam hubungan mereka dengan elit lokal atau dengan Eropa.

Kritikan lain juga menyebutkan bahwa pengajaran bahasa Inggris (ELT) dan penyebaran bahasa Inggris adalah sebagian dari wujud imperialisme barat di masa *colonia*l dan *post-colonial*: (Phillipson) dan Pennycook (1994) telah menjelaskan secara details terhadap informasi dari *British Council* di tahun 1930 sebagai penyebar propaganda Inggris dan berargumen bahwa kapasitasnya dalam hal tersebut tidak berkurang atau berubah dengan waktu.

### 3.1.4 *Peacekeeping English Project* (PEP) di Indonesia

Proyek Pengajaran Bahasa Inggris bagi Pasukan Penjaga Perdamaian dilaksanakan pada bulan November 2012 dan berbasis di Pusat Misis Penjaga Perdamaian (PMPP TNI) di Bogor, Indonesia.

Tujuan proyek ini adalah:

1. Untuk mendukung Indonesia menjadi Pusat Pelatihan Pasukan Perdamaian di wilayah Asia, terutama Asia Tenggara keunggulan untuk pelatihan dari Pasukan Penjaga Perdamaian PBB.
2. Untuk menaikkan tingkat kemampuan bahasa kekuatan personil pasukan perdamaian Indonesia sehingga mereka bisa secara efektif dalam berpartisipasi dengan Pasukan Penjaga Perdamaian Dunia yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kerja mereka.
3. Untuk membangun sistem jangka panjang berkelanjutan pelatihan bahasa Inggris dalam hubungannya dengan pusat Penjaga Perdamaian dan sekolah bahasa Militer Indonesia di seluruh negeri.

4. Untuk mengembangkan sistem pelatihan bahasa Inggris berdasarkan pada silabus khusus, fasilitas belajar dengan akses mandiri, suatu tujuan pengujian sistem dirancang dan berbagai peluang pelatihan guru (http://www.britishcouncil.org/learning-elt-pep.htm, Diunduh 29 Agustus 2013).

Bahasa Inggris memiliki sejumlah peran kunci untuk bermain di pasukan keamanan Indonesia dan pada operasi pemelihara perdamaian. Peran utama proyek ini adalah untuk memfasilitasi interoperabilitas dengan pasukan internasional lainnya pada misi PBB, dan untuk meningkatkan efektivitas operasi dukungan perdamaian. Kapasitas kemampuan dalam bahasa Inggris juga penting bagi tentara untuk memungkinkan mereka untuk berkomunikasi lebih baik dengan warga sipil, sementara pada penyebarannya, proyek ini didanai oleh Kementrian Pertahanan Negara Inggris. Bahasa Inggris untuk Pasukan Penjaga Perdamaian Indonesia dijalankan oleh *British Council* dan PMPP Indonesia di Indonesia.

Proyek ini melibatkan Indonesia melalui PMPP TNI sebagai penyedia fasiliatas dan Inggris melalui Kementrian Pertahanan dan *British Council* sebagai pemberi dana dan pelaksana program *Peacekeeping English Project* (PEP) (http://www.britishcouncil.org/accessenglish-news-english-security-peacekeeping-indonesia.htm, Diunduh 29 Agustus 2013).

Program *Peacekeeping English Project* (PEP) ini sendiri baru dicapai kesepakatannya dan di tandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Inggris David Cameron pada tanggal 1 November 2012 dan program *Peacekeeping English Project* (PEP) ini sendiri baru dilaksanakan begitu

setelah penandatanganan kerjasama dilakukan. Untuk *Peacekeeping English Project* disetiap negara penyelenggara, Kementrian Pertahanan Inggris memberikan bantuan dana sebesar 120,000 *Poundsterling* pada setiap tahunnya termasuk pembiayaan 15% untuk *British Council*.

Pelatihan bahasa asing *(Peacekeeping English Project)* ini diselenggarakan dengan tujuan agar setiap pasukan penjaga perdamaian Indonesia yang mengikuti program dapat menguasai paling tidak sebuah bahasa asing dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan (1 bulan) dan pada gilirannya diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan negara Indonesia untuk dapat mengirim pasukan perdamaian sebanyak 4.000 pasukan pada tahun 2014. Tujuan selanjutnya yaitu agar para tentara perdamaian Indonesia dapat berkomunikasi dengan warga setempat dengan menggunakan bahasa internasional ketika mereka diterjunkan ke negara tempat misi berlangsung.

## 3.2 Metode Penelitian

### 3.2.1 Desain Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan sebuah desain atau rancangan yang berisi rumusan tentang objek yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif analisis kualitatif. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia, maka peneliti hanya melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan oleh British Embassy –

British Council dan diimplementasikan dengan teori-teori dalam kajian Hubungan Internasional.

### 3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan sistem, yang didukung oleh teknik pengumpulan data: Studi Kepustakaan, Penelusuran data online, Dokumentasi, dan Wawancara. Hal ini dikarenakan penelitian ini difokuskan pada peran suatu organisasi internasional dengan mengolah data-data yang diperoleh dari sumber yang relevan secara mendalam.

#### 3.2.2.1 Studi Pustaka

Pengumpulan data dilengkapi dengan studi pustaka berupa bahan-bahan dalam tulisan, buku, majalah atau dokumen atau penjaringan data hasil penelitian yang berhubungan.

#### 3.2.2.2 Studi Lapangan

Dengan mengamati dan terjun langsung kelapangan. Kaitannya dengan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data langsung dalam bentuk wawancara yang memiliki tujuan mengumpulkan keterangan-keterangan lisan dengan cara bertanya langsung kepada informan untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang diamati peneliti.

### 3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik Penentuan informan yang dipakai peneliti adalah dengan menggunakan teknik penentuan *Purposive*. Yaitu peneliti menentukan pihak-pihak informan berdasarkan tujuan, masalah dan variabel penelitian. Metode yang digunakan adalah metode wawancara sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

Berkaitan dengan pengambilan data langsung, peneliti bertemu dengan narasumber yang menjadi salah satu anggota tim yang ditunjuk sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB.

### 3.2.4 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik reduksi data. Artinya, data-data yang diperoleh, baik melalui studi pustaka, penelusuran online dan wawancara, digunakan sesuai dengan keperluan penelitan berdasarkan dengan tujuan penelitian. Hal ini bertujuan supaya data yang digunakan berkorelasi dengan perumusan masalah yang telah dibuat. Penyajian Data, peneliti menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil meneliti dan wawancara atau dari sumber-sumber internet sesuai dengan kebutuhan. Penarikan Kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan dari beberapa data yang disajikan baik data primer atau sekunder.

### 3.2.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 3.2.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagai tempat di bawah ini sesuai dengan kebutuhan penelitian, diantaranya:

a. Kedutaan Besar Inggris di Indonesia (*British Embassy*). Jl. MH Thamrin No 75 Jakarta 10310.
b. British Council di Indonesia Jakarta. Indonesia Stock Exchange Tower 2 Lantai 16 Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190.

c. Perpustakaan Kementrian Pendidikan Nasional. Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Gedung A Lantai 1 dan Mezanin Jl. Jenderal Sudirman, Senayan – Jakarta Indonesia, 10270.
d. Perpustakaan Universitas Indonesia. Kampus UI Depok 16424 Depok, Jawa Barat.
e. Perpustakaan FISIP Universitas Padjajaran Jatinangor. Jalan Raya Jatinangor, Kab. Sumedang Jawa Barat.
f. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jalan Dipati Ukur, Bandung.

**3.2.5.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 6 bulan terhitung dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2013.

Tabel 3.4. Waktu Penelitian

| No | Aktivitas | Waktu penelitian Tahun 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mar | April | Mei | Juni | Juli | Agst |
| 1 | Pengajuan Judul | | | | | | |
| 2 | Pembuatan Usulan Penelitian | | | | | | |
| 3 | Seminar Usulan Penelitian | | | | | | |
| 4 | Pengumpulan Data | | | | | | |
| 5 | Bimbingan Skripsi | | | | | | |
| 6 | Sidang | | | | | | |